



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 915/II/VII/2016

**Tax Amnesty Bisa Atasi  
Defisit Anggaran**

**Peredaran Vaksin Palsu  
Harus Diinvestigasi**

**Ketua DPR RI Tinjau Persiapan  
Bandara Soetta Jelang Lebaran 2016**



RAPAT

WAKIL KETUA

**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# Tax Amnesty Bisa Atasi Defisit Anggaran

Sidang Paripurna mengesahkan Rancangan Undang-undang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak menjadi Undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan, UU tersebut memberikan ruang dalam kaitan menarik pemegang investasi di luar negeri. Hal itu dimaksudkan untuk mengembalikan dana ke Indonesia.

“Ada momentum yang hanya sekali dan waktunya sembilan bulan. Yang jelas, efektivitas pelaksanaan, proses dan hasilnya kita serahkan pada pemerintah. Syukur hasil yang diperoleh bisa lebih besar dari target Rp 165 triliun,” kata Taufik usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/06).

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, apakah UU *Tax Amnesty* bisa mencapai target atau tidak, menjadi tanggung jawab pemerintah. Meski demikian, dia berharap agar target bisa tercapai agar defisit anggaran dapat diselesaikan.

“Masa berlaku UU tersebut hanya sembilan bulan. Sehingga kesempatan bagi para pemegang modal di luar negeri, diberi

kesempatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut,” tegasnya.

Dia juga berharap agar pemerintah melakukan langkah optimal. Sehingga bisa menarik lebih banyak modal yang masuk. “Kalaupun kurang dari Rp 165 triliun, maka perlu ada optimalisasi langkah agar lebih menarik,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, meski pembahasannya tidak berhubungan dengan APBN-Perubahan, namun dia melihat *tax amnesty* memiliki kaitan yang erat.

“Sebab, *tax amnesty* berada dalam satu sesi perencanaan yang sama. Keduanya dalam satu proses tarikan nafas yang sama,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, dari sepuluh fraksi di DPR RI, sembilan sudah menyatakan setuju. Meski demikian, pihaknya menyatakan menghargai sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang berbeda dengan sikap sembilan fraksi lainnya.

“Namun kita kembalikan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR RI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan UU tersebut,” ucapnya.

Taufik menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara terbuka dan transparan. “Proses pembahasannya sama sekali tidak buru-buru atau kejar tayang. Yang pasti kita menghormati betul

setiap proses pembahasan yang dilakukan oleh Komisi XI.

Pimpinan DPR RI juga tidak ada yang masuk di dalam Panja RUU *Tax Amnesty*,” tegasnya.

Dikatakannya, DPR RI sangat menghargai dan mendukung apapun yang menjadi keinginan pemerintah. Khususnya terkait tindakan untuk mengefektifkan APBN demi kepentingan masyarakat.

“Bagaimana efektivitas pelaksanaan dan bagaimana teknisnya, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menanganinya. Selain itu, DPR RI menyerahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan dan mengatasinya,” tandas wakil rakyat dari Jawa Tengah itu.

Sementara dalam laporannya, Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit menjelaskan bahwa Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Selain itu, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

“Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak, terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah,” ucapnya.

Dia berharap, dengan disetujuinya UU Pengampunan Pajak, akan dapat mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Yaitu dengan repatriasi harta.

“Hal itu antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi,” jelasnya.

Selain itu, UU tersebut juga diharapkan bisa mendorong reformasi perpajakan. Yaitu menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

“UU tersebut juga bisa meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan,” imbuhnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memulai sosialisasi *tax amnesty* dan penerapannya setelah lebaran. “Hari ini (Rabu-red) langsung sosialisasi,” jelas Bambang. ■



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

# Paripurna DPR RI Sahkan RUU Pengampunan Pajak

Setelah melalui perdebatan sengit dan panjang, Rapat Paripurna DPR RI ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, Selasa (28/6).

Sembilan dari sepuluh fraksi menyetujui RUU ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan keberatan. Sedangkan Partai Demokrat menyatakan setuju untuk disahkan, dengan catatan seluruh *minderheidsnota* menjadi bagian dari keputusan rapat paripurna ini.

ini dipimpin langsung Ketua DPR RI Ade

Komarudin, didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR RI. "Saya kira kita sudah bisa menyimpulkan secara mayoritas sembilan fraksi dari sepuluh menyetujui rancangan undang-undang pengampunan pajak ini. Kami ingin bertanya kepada saudara-saudara, setujukah dengan undang-undang pengampunan pajak ini?" tanya Pimpinan Sidang kepada dewan sidang paripurna, seketika dijawab "setuju". Ketukan palu menjadi penanda sahnya UU Pengampunan Pajak.

Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan



Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit dan Pimpinan DPR RI

laporan Komisi XI DPR RI terhadap pembicaraan tingkat I serta pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam sambutannya Noor Supit menyampaikan, rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, pada tanggal 27 Juni 2016 dengan acara Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I.

Berdasar pendapat akhir mini yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan pemerintah menyatakan persetujuan

bagaimana pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Setelah pengesahan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan pendapat akhir

pemerintah terhadap RUU Pengampunan Pajak & APBNP 2016. Bambang menghaturkan terima kasih kepada DPR RI yang telah menyelesaikan APBN Perubahan 2016 dan RUU Pengampunan Pajak.

Bambang juga menyerahkan pendapat akhir kepada pimpinan sidang serta menyampaikan pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015. Tanggapan fraksi-fraksi terhadap pokok-pokok pertanggungjawaban APBN TA 2015 akan dilakukan pada Rapat Paripurna Selasa, 19 Juli 2016. ■

(eko.mp), Foto: Andri/mr

BULETIN PARLEMENTARIA



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR - RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR -RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Mudiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]

## Penyanderaan WNI Jangan Jadi Ritual

Tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan dua kelompok bersenjata di Laut Sulu, Filipina Selatan. Hal ini sudah ketiga kalinya terjadi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan, penyanderaan WNI jangan sampai menjadi ritual atau kembali terulang.

“Penyanderaan WNI ini seperti sudah menjadi ritual. Hanya karena kita menyelesaikannya secara pintas, dengan uang dan sebagainya, dan berharap masalah ini selesai dengan sendirinya. Tidak bisa begitu. Harus dituntaskan dengan cara kita bernegara,” tegas Fahri, usai buka bersama dengan Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/06) petang.

Politisi F-PKS itu menyarankan, jika Pemerintah Filipina tidak mau membantu pembebasan sandera ini, sebaiknya Pemerintah dapat menyelesaikannya dengan caranya sendiri.

“Seharusnya ada kerjasama dengan Pemerintah Filipina. Karena negara harus menjamin keselamatan warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan UU 1945,” pesan politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Suratna

Dikutip dari salah satu media nasional, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa para ABK WNI dari kapal bendera Indonesia *tugboat* Charles dan kapal tongkang Robby jadi korban penyanderaan dua kelompok bersenjata di Laut Sulu, Filipina Selatan.

“Setelah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di Indonesia dan Filipina, pada tanggal 23 Juni 2016 sore, kami dapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI kapal *Tug Boat* Charles 001 dan kapal Tongkang Robby 152,” kata Menlu.

Menlu tidak terima penyanderaan terhadap WNI terulang kembali. Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera. Kejadian yang ketiga kalinya ini tidak dapat ditoleransi lagi.

Menlu memastikan, keselamatan ketujuh WNI merupakan prioritas. Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar. ■

(g), Foto: Jaka/br



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

## Peredaran Vaksin Palsu Harus Diinvestigasi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong Pemerintah untuk menginvestigasi kejadian beredarnya vaksin palsu. Menurutnya, hal ini dapat dilacak dari keberadaan lembaga-lembaga yang ada terkait peredaran produk yang masuk dalam kategori obat itu.

“Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) misalnya. Karena tidak ada satupun obat, termasuk makanan yang dijual di Indonesia, yang tidak melalui mekanisme pengawasan BPOM,” tegas Fahri, usai acara buka bersama dengan Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Politisi F-PKS itu menilai, vaksin

ini beredar di apotik, toko obat, rumah sakit, hingga klinik kesehatan. Ia mengasumsikan, BPOM pasti mengetahui keberadaan vaksin, karena teregister.

“Ini pasti ada kebobolan. Karena sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa. Akan berbeda hal jika ini penyelundupan. Ini sudah masuk ke RS, dan di situ ada sistem logistik, pasti

diperiksa oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM," analisa Fahri.

Fahri menilai pengawasan terhadap peredaran vaksin ini lemah. Untuk itu, dia mendorong agar segera dilakukan investigasi, sehingga dapat dilacak para pelakunya.

"Oknum-oknum nakal itu ada dalam sistem. Tapi dengan menginvestigasi secara menyeluruh, akan ketahuan siapa yang melakukan

pembiaran atau siapa yang menutupi," saran Fahri.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu juga menilai, vaksin yang telah beredar dari tahun 2003 itu bisa dikaitkan dengan beberapa hal, seperti perizinan perusahaan, hingga pajak. Sehingga, tidak mungkin hal ini tiba-tiba muncul ke permukaan tanpa ada riwayatnya.

"Oleh sebab itu, agak aneh tiba-

tiba ada seolah-olah skandal yang kita tidak tahu sebelumnya, trus tiba-tiba muncul masalah ini. Tidak ada yang namanya ujug-ujug (tiba-tiba,-RED) di negara ini. Pasti ada yang bisa ditagih pertanggungjawabannya," tegas Fahri.

Fahri juga mengingatkan, jika BPOM ternyata juga lalai dalam melakukan pengawasan, sekiranya juga perlu mendapat sanksi. ■

(gf) Foto: Arief/hr

## Ketua DPR RI Tinjau Persiapan Bandara Soetta Jelang Lebaran 2016

Ketua DPR RI Ade Komarudin meninjau persiapan Bandara Internasional Soekarno - Hatta, Cengkareng, Tangerang, pada Rabu (29/6) jelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2016.

Dalam kunjungan ini, Akom, panggilan akrab Ade, didampingi Ketua Komisi V Fary Djemy Francis (F-Gerindra), Wakil Ketua Komisi VI Azman Natawijana (F-PD) dan Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra).

"Kunjungan kesini dalam rangka mengecek persiapan Angkasa Pura II sebagai otoritas pengelola bandara terkait kesiapan menghadapi mudik lebaran," ungkap Akom usai peninjauan Terminal 1 Bandara Soetta.

Mengawali inspeksinya ke Terminal 1A penerbangan domestik, Akom bersama anggota DPR RI lainnya menemui dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan para penumpang terkait pelayanan serta harga tiket pesawat menjelang mudik lebaran tahun ini.

Kepada politisi F-PG itu, para penumpang menyampaikan agar aktivitas penerbangan selama jelang lebaran berlangsung lancar.

"Sejumlah penumpang tidak ada yang mengeluhkan soal harga tiket, karena tidak ada kenaikan harga yang signifikan selama menjelang lebaran ini. Penumpang



Ketua DPR RI Ade Komarudin meninjau persiapan Bandara Internasional Soekarno - Hatta

berharap agar bandara tidak lagi mengalami keterlambatan keberangkatan," ujar Akom.

Dalam kesempatan ini, Akom juga meminta Angkasa Pura II untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang sekarang ini fluktuatif.

"Sekarang, H-10 ada peningkatan penumpang 35 persen, tetapi besok bisa saja turun, kesiapan ini yang kita cek terutama menyangkut soal keamanan. Kalau ada *delay*, jangan keterlambatan sehingga mengecewakan para penumpang," pintanya.

Khusus mengenai keterlambatan ataupun penundaan penerbangan, politisi asal dapil Jawa Barat itu mendorong

maskapai lainnya untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi dan perbankan agar penumpang bisa klaim uangnya jika tidak jadi terbang atau ditunda ke hari lain.

"Kami mendorong maskapai lainnya untuk mencontoh Garuda Indonesia dan Citylink yang menggandeng Askrido dan Bank BRI untuk menjamin penumpang jika terjadi penundaan penerbangan," imbuh Akom.

Berdasarkan data Dirjen Perhubungan, Bandara Soetta melayani 1,7 juta penerbangan pada tahun lalu atau sebanyak 47 persen pemudik pesawat domestik di Indonesia dilayani di bandara ini. Artinya, angka tersebut setara dengan 3,7 juta pemudik yang memilih pesawat sebagai alat transportasi.

Selain meninjau Terminal 1A, rombongan juga meninjau Terminal 2F dan Terminal 3 Ultimate, serta Garuda Indonesia Sentra Operasi. Akom juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah penumpang dan petugas. ■

(ans/f) foto: Rani dan kresno/hr

# Ketua DPR RI Ikut Berduka atas Korban Bom Turki

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, pihaknya turut berduka atas peristiwa serangan bom bunuh diri di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul, Turki, pada Selasa (28/6) malam lalu. Dikabarkan, sebanyak 28 orang tewas atas kejadian memilukan ini.

“ Kita bangsa Indonesia tentu turut berduka atas peristiwa yang memilukan itu dan semoga pada korban yang wafat diterima imannya oleh yang maha kuasa, kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Akom, panggilan akrab Ade, saat meninjau Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (29/6).

Politisi F-PG itu mengingatkan kepada seluruh warga dunia harus mewaspadai ancaman radikalisme. Fanatisme yang berlebihan terhadap agama pun harus dicegah, baik secara kultural maupun struktural.

“Secara struktural, pengamanan semuanya harus waspada. Terutama menjelang Lebaran ini supaya tidak terjadi apa-apa, semoga bangsa ini aman dan tenteram,” harap politisi asal dapil Jawa Barat, terkait dengan persiapan Bandara Soetta dalam

menghadapi arus mudik Lebaran 2016. Sebagaimana diketahui, bom bunuh diri meledak di Bandara Ataturk, Istanbul, Turki mengakibatkan 28 orang



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan keterangan pers

tewas dan 60 orang terluka. Gubernur Istanbul Vasib Sahin menyebutkan ledakan ini diduga dilakukan tiga pelaku bom bunuh diri.

Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag sebelumnya mengatakan,

informasi awal menyebutkan seorang teroris memasuki terminal bandara dan melepaskan tembakan memakai senapan Kalashnikov. Sesudah itu, pelaku tersebut meledakkan diri.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Masurdi memastikan, di antara puluhan korban itu, tidak ada warga negara Indonesia (WNI).

Menlu menjelaskan, KJRI Istanbul juga sudah terjun langsung ke bandara lokasi ledakan bom, dan mendatangi rumah sakit para tempat korban dirawat. Hasilnya, tidak ada satu pun WNI tercatat jadi korban dalam tragedi ledakan bom Turki.

“Saat ini terdapat 728 WNI di Turki, 310 di antaranya adalah mahasiswa. Pemerintah ingin ingatkan seluruh WNI di Turki untuk jaga keamanan pribadi, hindari tempat keramaian yang bisa jadi target teror, dan ikuti aturan yang disampaikan otoritas setempat,” pesan Menlu. ■

(sfamm)/foto - Kresna/br

## Fahri Hamzah Gelar Bukber dengan Media Kesetjenan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggelar acara buka puasa bersama dengan awak media dibawah struktur Kesetjenan, yakni Bagian Media Cetak Dan Media Sosial, serta TV Parlemen.

Pada kesempatan acara tersebut Fahri Hamzah memberikan arahan serta motivasi agar keberadaan media informasi DPR RI tersebut bisa menjadi sebuah corong informasi yang bersifat membangun, serta menjadi sebuah media pendukung kinerja Dewan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

“Ada tiga hal yang akan saya bicarakan, pertama soal kebosanan, lalu yang kedua tentang pembangunan parlemen sebagai cara menjaga demokrasi, dan yang terakhir mengenai tentang pentingnya kelembagaan-kelembagaan penerbitan, humas, TV Parlemen dan lain sebagainya,” ujar Fahri di Komplek Parlemen, senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Menurutnya, tiga hal tersebutlah yang mungkin akan bisa memberikan perspektif kepada para peserta yang hadir,



Suasana buka puasa bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan Media Kesetjenan

sebab kalau manusia hanya mempunyai perspektif jangka pendek maka semua orang bisa jadi pembosan. Dan bosan merupakan salah satu diantara penyakit yang berbahaya bagi manusia," ujar Fahri.

"Kebosanan rakyat terhadap politisi harus kita lawan dengan cara membangun parlemen yang baik. Disitulah fungsi media

informasi DPR RI berperan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang hasil kerja anggota Dewan, serta menyebarkan informasi tentang aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini, yang notabene merupakan aset milik seluruh Rakyat Indonesia," tuturnya.

Fahri juga menyampaikan bahwa saat

ini alat-alat prasarana pendukungnya sudah mulai menyesuaikan, tetapi kapasitas SDM nya juga harus di *training* dengan ilmu-ilmu baru, supaya menjadi *the best of the best* dari orang media lainnya.

"Dengan demikian DPR RI itu menjadi pusat *training* bagi otak-otak terbaik di bidang media," tandas Fahri. ■

(dep.mp.) Foto: Arif/Im

## Fadli Zon Klarifikasi Permintaan Fasilitas Pendampingan Putrinya

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya salinan faksimile surat permintaan fasilitas untuk putrinya- Shafa Sabila Fadli, yang isinya bahwa Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI di Washington DC melalui KJRI New York, untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon dalam rangka mengikuti Stage Door Manor 2016.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

“ Saya harus tegaskan, bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak Kesekjenan. Saya sendiri belum pernah melihat langsung fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas, karena memang tidak ada fasilitas yang digunakan,” tegas Fadli menjawab pers Selasa (28/6).

Fadli juga mengatakan bahwa putrinya tersebut sedang mengikuti kegiatan satu kursus singkat atau sekolah teater performing arts, yang bernama stagedoor manor camp. Kegiatan tersebut adalah untuk yang ke empat kalinya, dan pada saat ini putrinya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang ikut didalam kegiatan tersebut.

"Memang seharusnya tahun ini saya yang menemani, tetapi karena kegiatan saya di DPR RI cukup padat, maka saya tidak bisa menemani untuk mengantar. Tetapi kalau meminta fasilitas pendampingan itu tidak ada, karena yang namanya di *camp* itu tidak bisa didampingi oleh siapapun," ucapnya.

"Ini anak perempuan saya, jadi saya juga merasa was-was. Apalagi dengan adanya kejadian-kejadian di Amerika seperti penembakan dan sebagainya. Jadi saya hanya menyampaikan itu, tidak meminta fasilitas, tidak meminta pendampingan. Jadi memang inisiatif dari staf saya meminta untuk dijemput, untuk memastikan tidak ada masalah di

imigrasi, dan mengantar dari airport ke rumah orang Indonesia, hanya itu," tandas politisi F-Gerindra tersebut.

Fadli menyatakan bahwa walaupun ada dana KJRI yang terpakai, maka hanya dana bensin dari airport ke rumah orang Indonesia. Diperkirakan, tidak sampai 100 Dollar, atau sekitar satu juta dua ratus ribu rupiah.

"Nanti saya suruh staf saya untuk mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin kepada Kementerian Luar Negeri, kalau memang hal itu dianggap sebagai suatu pemakaian fasilitas. Tetapi saya sendiri tidak pernah meminta, dan disana anak saya memakai mobil sewaan, jadi tidak pernah memakai mobil dari KJRI," tuturnya.

Dengan disebarluaskannya surat tersebut oleh oknum pihak KJRI atau dari KBRI Washington, dimana termuat nomor telepon seluler putri Fadli Zon, tentu hal itu juga menjadi perhatian Fadli Zon, sebab dianggap telah mengganggu privasi putrinya. Terbukti dengan diterimanya ratusan sms ke nomor HP tersebut.

"Saya tidak tahu maksud dari KJRI atau KBRI menyebarluaskan ini, dan saya juga ingin mengetahui sebenarnya siapa saja yang mendapat fasilitas penjemputan yang dilakukan oleh pihak KJRI atau KBRI di Wahington selama ini. Jangan sampai ada diskriminasi karena saya adalah politisi di luar pemerintahan, kemudian ini dilakukan seperti itu. Apalagi kebetulan saya adalah Wakil Ketua DPR RI, disini juga ada protokoler, dan saya kadang tidak tahu bagaimana kerja protokoler sebagai pejabat tinggi negara. Saya ingin pihak KJRI menjelaskan, karena sekarang anak saya itu merasa agak resah juga atas kejadian ini, dimana nomor *handphone* nya disebarluaskan tanpa ada izin," pungkasnya. ■

(dep.mp.) Foto: icam/br

## Data Empiris Mengecewakan, Tax Amnesty Harus Dijalankan Hati-hati

Data empiris di dalam maupun di luar negeri memperlihatkan tingkat keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) banyak mengecewakan. Indonesia sudah tiga kali menjalankan program ini dan lebih banyak tidak berhasilnya. Untuk itu, *tax amnesty* perlu dijalankan hati-hati setelah RUU-nya disahkan DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyatakan hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/6). "Memang kalau kita pelajari di berbagai negara, lebih banyak gagalannya daripada suksesnya. Ya, itu sebabnya kita harus melakukannya dengan hati-hati, dengan perhitungan agar Undang-undang ini betul-betul bisa dijalankan di lapangan. Pemerintah harus menjalankannya dengan serius dan keamanannya juga harus dijamin," kata Hendrawan.

Tahun 1964 dan 1983, Indonesia pernah menjalankan program pengampunan pajak. Namun, karena kondisi politik yang tidak kondusif, program tersebut tidak berhasil. "Sementara tahun 1983 pernah

dilakukan, karena saat itu terjadi pergantian rezim dari *official assesment* jadi pembayaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah menjadi *self assesment* dan dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan," jelas Anggota F-PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Hendrawan juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden beberapa waktu lalu untuk membincang pengampunan pajak. Presiden sangat positif menyambut pengesahan RUU ini. Dalam pertemuan tersebut juga terjadi diskusi tentang perhitungan target program pengampunan pajak. Perhitungan ini, lanjut Hendrawan, belum pernah disampaikan oleh Menkeu sebelumnya di Komisi XI. ■



Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno

## Komisi X Minta Kemenpar Ambil Langkah Strategis

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebagai akibat dari tambahan pemotongan anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2016. Hal ini mengingat pentingnya target kepariwisataan terhadap devisa negara dari sektor pariwisata.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/06), yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto.

Sebagaimana kesimpulan dalam raker ini, Komisi X DPR RI menyetujui usul pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 784,6 miliar dan tambahan pemotongan anggaran sebesar Rp 400 miliar dalam RAPBN-Perubahan 2016.

"Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 1,184 triliun ini,

maka pagu definitif Kemenpar yang semula sebesar Rp 5,409 triliun, kini menjadi Rp 4,225 triliun," jelas Utut.

Politisi F-PDI Perjuangan itu memastikan, sebagai bagian dari fungsi DPR RI, Menpar diminta melaporkan pelaksanaan APBN-Perubahan kepada Komisi X DPR RI per masa sidang.

"Namun terhadap pemotongan anggaran Kemenpar sebesar Rp 1,184 triliun itu, F-Gerindra belum memberikan pendapat. Untuk selanjutnya, pemotongan anggaran tersebut diserahkan kepada Anggota Banggar dari F-Gerindra," tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

# Komisi X Setujui Pemotongan Anggaran PNRI Sebesar Rp 88,8 Miliar

Komisi X DPR RI menyetujui usulan pemotongan anggaran belanja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebesar Rp 88,8 miliar dalam RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2016. Pemotongan anggaran itu bersumber dari beberapa program di PNRI.

Demikian menjadi salah satu kesimpulan rapat antara Komisi X DPR RI dengan Kepala PNRI, Muhammad Syarif Bundo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/06).

Pemotongan anggaran itu ada dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 11,1 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 603 juta, dan program pengembangan perpustakaan penguatan literasi melalui kegiatan



Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih

sebesar Rp 77 miliar.

Di satu sisi, "Komisi X DPR RI juga menyetujui penyesuaian t a m b a h a n anggaran fungsi pendidikan untuk PNRI pada RAPBN-Perubahan TA 2016 sebesar Rp 200 miliar yang dialo-

kasikan untuk

pembudayaan gemar membaca," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, saat membacakan kesimpulan rapat.

Kegiatan itu, tambah Fikri, antara lain melalui perpustakaan komunitas, perpustakaan keagamaan, perpustakaan keliling, perpustakaan lapas, perpustakaan daerah 3T, hingga sosialisasi pembudayaan gemar membaca.

"Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 88,8 miliar dan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar, maka pagu definitive PNRI yang semula sebesar Rp 701 miliar, kini menjadi Rp 812 miliar," papar politisi F-PKS itu.

Dalam rangka pengawasan dan evaluasi target kinerja PNRI, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, Komisi X DPR RI dan PNRI sepakat pelaksanaan APBN-P dilaporkan kepada Komisi X DPR RI per masa sidang. ■

(sfp) Foto: Anndri/hr

## BUMN Tak Seharusnya Bebani Negara

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak seharusnya membebani negara, tapi sudah semestinya memberikan pemasukan bagi negara, sehingga tidak memberatkan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 32 pada Selasa, (28/06).

“ Karena sejatinya Badan Usaha Milik Negara tidak hanya minta disusui terus tapi juga bisa memberikan pemasukan kepada negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, fraksinya menolak penyertaan modal negara (PMN) dimasukkan ke dalam APBN-P 2016. "Fraksi PAN terhadap penyertaan modal negara sudah sangat jelas dalam Komisi VI dan di Badan Anggaran bahwa fraksi PAN menolak penyertaan modal negara dimasukkan dalam APBN-P 2016," tegas Yandri.

Politisi dapil Banten II ini mengingatkan, jika BUMN diberikan PMN maka hal itu dapat menimbulkan anomali anggaran karena disaat bersamaan juga terjadi pemangkasan

anggaran kementerian/lembaga. Ia menegaskan seharusnya BUMN yang memberi kontribusi besar untuk negara.

"Oleh karena itu kami menganggap itu tidak adil. Dan Fraksi PAN tetap berketeguhan hati menolak penyertaan modal negara dimasukkan dalam APBN-P 2016," tegasnya, ia pun meminta PMN tidak dimasukkan dalam APBN-P 2016.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Komisi VI telah menyetujui PMN kepada 20 BUMN sebesar Rp 44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-

tunai Rp 16,13 triliun. ■



Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto

(bs-mp) Foto: Anndri/hr

# Willem: Peresmian Rumah Khusus Wujud Konkrit Kehadiran Negara

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mengatakan peresmian rumah khusus yang salah satunya peruntukannya bagi tokoh keagamaan, tokoh adat dan masyarakat lintas batas merupakan wujud konkrit dari kehadiran Negara dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Papua.

“ Karena masyarakat di Papua ini hidupnya masih komunal, sehingga tokoh adat dan tokoh agama itu mempunyai tanggung jawab lebih dan besar. Mereka tidak hanya melihat pada anak istri, tetapi mereka juga bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya,” ujar Willem kepada Parlemen, di Jayapura, Papua, Sabtu (25/6), usai peresmian rumah khusus oleh Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Willem menjelaskan bagaimana para tokoh adat dan keagamaan harus berkorban lebih banyak, seperti untuk kehidupan sehari-hari, dan persoalan kehidupan sosial, “Karena kalau ada apa-apa, peran tokoh adat dan tokoh agama itu sangat tinggi, terutama tokoh agama dalam rangka menjaga dan membina pembinaan mental dan moral sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing,” terangnya.

Politisi dari partai Demokrat dapil Papua ini menambahkan, terlebih lagi peran daripada tokoh adat, dimana mereka sangat membantu pemerintah daerah dalam rangka menjaga dan memberikan pembinaan adat kepada masyarakat, “Mereka juga ikut berkontribusi dalam mobilitas Kamtibmas ditanah Papua,” tegasnya.

Untuk itu, sebagai penyelenggara negara, ujar Willem, Komisi V DPR RI terlebih lagi yang berasal dari dapil Papua mempunyai tanggung jawab untuk terus mengawalinya, “Apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan tanah Papua yang diusulkan oleh MRP melalui Pokja Keagamaan akan terus kami kawal di DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya dalam sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR pada tahun 2015 membangun sebanyak 1.204 unit rumah khusus di 14 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua.

Jumlah tersebut, menurut Basuki, lebih dari 18 persen dari jumlah rumah khusus yang dibangun pada tahun 2015 diseluruh

Indonesia yaitu sebanyak 6.567 unit.

“Dari 1.204 unit tersebut, 100 unit rumah diperuntukan bagi Kelompok Kerja Keagamaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tersebar di Kota Jayapura 20 unit, dan 8 kabupaten yaitu kab. Keerom, Nabire, Yapen, Tolikara, Jayawijaya, Yalimo, Paniai, dan Kab. Biak

Numfor yang masing-masing 10 unit. Rumah tersebut diperuntukan bagi pimpinan keagamaan, kepala suku dan masyarakat lintas batas atau pengungsi,” terang Basuki.

Pembangunan rumah khusus di Provinsi Papua tambah Basuki, pada tahun anggaran 2016 yaitu pembangunan sebanyak 1.246 unit di 1 kota dan 18 kabupaten, termasuk diantaranya yang diperuntukan untuk Pokja Keagamaan



Tim Kunjungan Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Jayapura

MRP di 5 kabupaten yaitu, Kab. Supiori, Waropen, Dogiyai, Deiyai dan Kab. Intan Jaya.

“Diharapkan dengan pembangunan perumahan ini dapat memberikan manfaat agar masyarakat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, sehingga potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua dapat ditingkatkan,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ■

(nt) Foto: Nita/br

## Larangan Menteri Rini Hadiri Rapat di DPR RI Bukan Rekomendasi Pansus Pelindo

Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Refrizal menilai bahwa keputusan DPR RI melarang Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat-rapat di Senayan adalah keputusan keliru dan hanya merugikan lembaga parlemen yang notabene adalah mitra dewan menjalankan tugasnya.

Anehnya dari Istana Negara, Presiden Joko Widodo juga terkesan mengamini sikap politik parlemen tersebut. Di mana sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang

saat itu merangkap Plt ketua DPR RI, diputuskan bahwa DPR RI tidak akan melakukan raker dengan menteri BUMN, termasuk juga dalam pembahasan APBN.

Sementara larangan itu 'diklaim' hasil dari tindak lanjut permintaan Pansus Panitia

## Hetifah Sambangi Redaksi Parlementaria

Anggota Komisi II Hetifah Sjaifudian mengunjungi kantor Redaksi Parlementaria guna silaturahmi dan ramah tamah dengan seluruh staf pada Jumat, (24/06) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam penuh kehangatan, seluruh staf yang saat itu berada di kantor redaksi berkenalan dengan politisi Golkar tersebut. Tak hanya berkenalan, Hetifah pun menyusuri sudut-sudut ruang redaksi tersebut.

Dalam paparannya, ia mengapresiasi kinerja staf yang berupaya mengekspos pemberitaan bagi kerja-kerja anggota dewan. Menurutnya, masyarakat perlu tahu tentang apa

saja yang dilakukan anggota dewan. "Ya, ini perlu karena masyarakat juga perlu mengetahui apa saja yang dilakukan anggota dewan," ujar Hetifah.

Ia pun juga mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan Redaksi Parlementaria, karena sejauh ia merasa terbantu karena masyarakat di dapilnya mengetahui kerja keras DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, *budgeting*

Angket Pelindo II. Apalagi sebelumnya, pansus meminta Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Rini dari jabatannya sebagai menteri BUMN.

"Saya sudah minta agar rekomendasi itu segera dicabut. Sebetulnya tak ada rekomendasi Pansus Pelindo II (melarang, red) rapat dengan Menteri Rini. Itu hanya hanya surat dari Ketua Pansus ke pada Pimpinan DPR RI. Setahu saya rekomendasi itu tidak ada. Saya sudah baca bolak balik tidak ada rekomendasi larangan rapat dengan menteri BUMN," kata Refrizal saat berkunjung ke Pelindo 4, Pelabuhan Makassar, Rabu (22/06).

"Kita sudah minta segera dicabut. Saya kira demikian. Ini yang aneh dan bahaya,



Anggota Komisi II Hetifah Sjaifudian bersilaturahmi dengan seluruh staf Parlementaria

dan pengawasan. "Terima kasih karena sejauh ini sudah cukup terbantu," terangnya.

Dalam kunjungannya yang mendekati hari Raya Idul Fitri tersebut, ia pun mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri kepada seluruh staf dan menyarankan untuk berhati-hati di perjalanan bagi yang ingin melakukan mudik ke kampung halaman.

jika ini tidak dicabut segera, siapa pun menteri BUMN akan dilarang terus rapat dengan mitra di Komisi di DPR RI. Siapa yang kontrol pemerintah nanti, BUMN seperti Pelindo dan BUMN lainnya siapa yang awasi?" lanjutnya.

Politisi PKS asal Dapil Sumatera Barat II ini mengungkapkan, rapat dengan seorang Menteri adalah rapat dengan Presiden yang diwakilkan untuk menjembatani kepentingan dewan dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi, fungsi *budgeting* dan legislasi.

Sebagaimana diketahui, Hetifah dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Neni Moerniaeni dari Dapil Kalimantan Timur yang mencalonkan diri menjadi Walikota Bontang pada Pilkada Serentak 2015. Meskipun begitu, sebelumnya pada tahun 2009-2014 ia pun juga bertugas sebagai Anggota DPR RI yang duduk di Komisi V. Kini ia duduk di Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Sebelum terpilih menjadi legislator di 2009, Hetifah adalah aktivis kebijakan publik dan tata pemerintahan. Hetifah adalah pendiri AKATIGA (pusat analisis sosial) dan Direktur Eksekutif dari *B-Trust Advisory Group* di Bandung. Ia pun juga telah menyelesaikan studi doctoral di *Politics and International Relations, Flinders University, Adelaide, Australia.*

(bs.mpi), Foto: Jayadi/br



Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Refrizal didampingi Anggota Pansus Dwie Aroem

"Rapat dengan menteri pada hakikatnya rapat dengan Presiden diwakili oleh Menteri dari unsur pemerintah. Kalau kita larang, yang rugi kita sendiri" ujar Refrizal. ■

(aw), Foto: Agung S/br

## Anggota Pansus Pelindo Sebut RJ Lino Tak Pantas Dihukum

Richard Joost Lino atau RJ Lino telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pelindo II. Keputusan ini diambil oleh pemegang saham pasca ditetapkannya RJ Lino sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan *quay container crane* (QCC).

**N**amun, Anggota Pansus Pelindo II DPR RI Refrizal menyayangkan keputusan itu. Meski politisi asal Dapil Sumatera Barat II ini menerima itu dengan besar hati dan lapang dada.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai RJ Lino memiliki kontribusi besar membesarkan PT Pelindo selama ini. Sehingga negara tak melupakan kontribusi besar seseorang pada bangsa ini.

Sebagai informasi tambahan, RJ Lino selama lebih 6 tahun ini membangun *Indonesia Port Corporation* (IPC). "Ini juga jadi masalah karena terburu-buru KPK, menetapkan RJ Lino sebagai



*Tim Kunker Pansus Pelindo II meninjau pelabuhan Pelindo IV di Makassar*

tersangka. Nah ini agak miris, ini agak masalah di republik ini," kata Refrizal, saat kunjungannya di Pelindo IV, Makassar, Senin (22/6).

"Seharusnya jangan atas dasar

kepentingan, berdasarkan kebencian atau berdasarkan kepentingan kelompok menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, tak *balance*, ini jadi masalah, seharusnya keadilan dalam rangka untuk menegakan hukum," sambungnya.

Menurutnya, RJ Lino tak pantas dijadikan tersangka jika dilihat dari prestasi yang telah ditorehkan selama 6 tahun memajukan Pelindo. Kesalahan sedikit, teranginya, jangan menutup mata untuk mengapresiasi prestasi seseorang.

"Prestasi Lino kan luar biasa, membangun pelabuhan tanpa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan asetnya bagus. Saya tahu hingga trilunan keuntungannya. Ini kan, sebuah prestasi. Keuntungan masih tetap 1,5 triliun per tahun. Dulunya, pelabuhan kumuh kini pelabuhan menjadi baik dan bersih. Ini kan sebuah prestasi," jelasnya.

"Manusia itu tak ada yang tidak memiliki kesalahan, karena yang tak salah itu Nabi saja.

Salahnya (RJ Lino) kita harus bersikap dengan adil dan harus diingat jasa-jasa orang harus kita akui dan hormati. Pasti setiap orang mempunyai kesalahan," pungkasnya. ■

(as) Foto: Agung/hr

## Pemotongan Anggaran Sulitkan Kementerian Kejar Target

Pemotongan anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam APBN-Perubahan 2016 dikhawatirkan menyulitkan masing-masing K/L untuk mengejar target. Apalagi terkait dengan anggaran fungsi pendidikan yang turut menentukan masa depan bangsa.

**D**emikian ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). Sebagaimana diketahui, Kemenristekdikti mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,953 triliun pada APBN-Perubahan 2016.

"Kami melihat pemotongan anggaran Kemenristekdikti di APBN-P ini dapat menyusahakan Kementerian untuk

mengejar target. Apalagi kita tahu, ini tahun ajaran baru, sehingga mahasiswa dan dosen bertambah. Termasuk perlunya penambahan sarana dan prasarana," sesal Sutan.

Padahal, persepsi yang dipahami Sutan dengan adanya APBN-Perubahan itu adalah penambahan anggaran, karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kondisi dalam APBN-P terjadi terus menerus terjadi pemotongan, ini berarti beda dengan tahun-tahun



*Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra*

sebelumnya. Kita ingin Pemerintah dengan pemotongan anggaran ini harus bekerja lebih keras dari sektor penerimaan pajak," saran Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menilai, penerimaan pajak yang tidak mencapai target, berimbas kemana-mana. Pemerintah terus-menerus mengutamakan anggaran infrastruktur, padahal di satu sisi, anggaran pendidikan juga tak kalah penting.

"Kita harus punya kendali yang tepat. Infrastruktur boleh, tetapi kan ada yang bisa ditunda. Kalau anggaran pendidikan ini tidak bisa ditunda, karena ini investasi di masa depan," tegas Sutan.

Dengan adanya pemotongan

anggaran ini, Sutan menilai Pemerintah tidak konsisten dengan janji kampanyenya. Menurutnya, dulu Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengutamakan anggaran pendidikan, namun dalam perjalanannya, hal itu belum terbukti.

"Janji kampanye Presiden itu mengatakan berapapun anggaran pendidikan, akan direalisasikan. Namun dalam kenyataannya, ini malah dipotong. Kami mengingatkan janji Presiden, anggaran pendidikan akan diutamakan.

Namun dalam kenyataannya, malah tidak," sesal Sutan.

Untuk itu, tambah politisi asal dapil Jambi itu, terkait dengan pemotongan anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga ini, fraksinya belum memberikan pendapat.

"Kami dengan tegas tidak memberikan pendapat, agar dapat menjadi koreksi untuk Pemerintah. Sesuai dengan fungsi DPR RI, salah satunya untuk melakukan pengawasan, agar pendidikan semakin baik," pesan Sutan. ■

(5) Foto: Atzka/mr

## Kekecewaan Pada Pemimpin Munculkan Paham Ultranasionalisme

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan hal yang memicu munculnya paham ultranasionalisme adalah kekecewaan yang terus-menerus kepada penguasa atau pemimpin.

Ia mengambil contoh dengan munculnya calon Presiden AS Donald Trump dengan pemikiran ekstrimnya yang hendak menguasai politik Amerika Serikat (AS). Di Eropa, ditandai dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan terpilihnya Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk di Asia.

"Kekecewaan kepada para pemimpin yang sangat berkuasa, memicu munculnya paham ultranasionalis seperti Donald Trump di AS, Jean Marry Lepen di Perancis, terpilihnya Presiden Filipina Rodrigo Duterte, hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa," kata Fahri, sesaat sebelum acara buka puasa bersama Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (27/6).

Sementara untuk di Indonesia, masih kata Fahri, belum terjadi hanya karena belum mencapai titik ekstrimnya. Tapi ia melihat gejala akan munculnya ultranasionalis sudah ada.

"Makanya, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal, maka saya prediksi politik kita akan merindukan orang yang memiliki narasi yang rumit, karena kecerdasan publik akan mengantarkan pada kerinduan terhadap orang yang punya narasi yang kompleks," tegas politisi F-PKS itu.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Saat ini, Fahri menilai Jokowi sukses dengan narasi yang mensimplifikasi masalah. Padahal, demokrasi yang baik seharusnya tidak boleh mentoleransi simplifikasi. Karena yang harus dominan dalam pengambilan keputusan adalah ilmu pengetahuan. Kalau dominannya itu cuma kepentingan saja, pasti ada masalah di kemudian hari.

"Fakta ini, sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus keuangan dan politik yang dilakoni secara tertutup dan dominan

interest daripada pengetahuan.

Makanya saya mau mendorong eksekutif untuk tidak terlalu gampang ambil keputusan. Yang gampang itu tidak baik," saran politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sehingga, menurutnya penting membangun sistem parlemen modern, parlemen yang sama-sama kuat dengan Pemerintah untuk saling kontrol demi terwujudnya rakyat, yang juga modern. Palsunya saat ini mulai cenderung tidak mau dikontrol, sehingga segala kebijakan dan keinginannya diharapkan untuk diikuti oleh DPR RI.

Fahri menjelaskan, hal itu terjadi pada pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurutnya, pembahasan RUU ini lebih

menekankan keinginan, hasrat, dan bukan akal sehat.

"Parlemen yang modern itu harus didukung dengan parpol yang modern, profesional. Hanya saja parpol saat ini tidak dibangun dengan warna ideologi politik yang jelas. Bahkan kalah dengan jebakan survei - popularitas seseorang dalam Pilkada dan Pemilu. Jadi, tak ada demokrasi tanpa penguatan parpol," imbuah Fahri, usai diskusi yang berlangsung dengan keakraban, acara dilanjutkan dengan buka bersama. ■

(6) Foto: Arif/bbr

## Anggaran Rp 12 Triliun Masih Kecil Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, pergerakan ekonomi nasional selayaknya dituntut untuk selalu tumbuh secara dinamis. Komisi VI DPR RI yang memiliki kewenangan pengawasan dalam ruang lingkup industri, investasi dan persaingan usaha tentu terlibat dalam pertanggungjawaban pertumbuhan ekonomi nasional.

**N**amun sayangnya, 11 mitra kerja Komisi VI dalam pemerintahan yang berperan langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan mendapat potongan anggaran, yang jika diakumulasi sekitar 20 persen.

"Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ekonomi Bergeraknya dari Komisi VI. Pemotongan rata-rata 20 persen, dan itu sangat berarti untuk mitra-mitra Komisi VI," ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana, usai membahas perubahan alokasi anggaran tahun 2016 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (27/6).

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini, mengungkapkan total anggaran untuk mitra kerja Komisi VI ada sekitar 12 triliun. "12 triliun itu kalau di Komisi lain itu satu dirjen, jadi kecil



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana bersalaman dengan Menteri Keuangan usai raker

sekali. Padahal mitra Komisi VI ini yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi," keluh Azam.

Anggaran 12 triliun tersebut untuk 11 pasangan kerja Komisi VI, masih dinilai belum cukup. 11 pasangan kerja tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), serta, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

"Mudah-mudahan Pak Menteri memahami harapan dari Pimpinan Komisi VI, agar di tahun selanjutnya dipertimbangkan supaya tidak ada pemotongan," pinta Azam. ■

(ekonomi), Foto: Jakarta

## Komisi IV dan Pemerintah Bahas DIM RUU Karantina

Komisi IV DPR RI menggelar raker dengan beberapa Kementerian yang menjadi mitra kerjanya di pemerintah, guna membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

**D**ari hasil inventarisasi DIM yang ada, kami meminta persetujuan dalam rapat kerja ini yakni jumlah DIM sebanyak 486 DIM dengan rincian konsideran menimbang dan mengingat sebanyak 1 DIM, DIM Tetap (kosong dan strip) sebanyak 229 DIM, DIM Perubahan (DIM Usulan Baru dan

DIM dihapus) sebanyak 256 DIM," ujar Ketua Komisi Edhy Prabowo yang memimpin raker tersebut di Gedung Parlemen, Senayan. Jakarta, Senin (27/6).

Dalam paparan pengantar raker itu, Edhy Prabowo menyampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui atau disahkan dalam

rapat kerja tanggal 22 Juni 2016, bahwa Konsideran menimbang, melihat berjumlah 1 DIM dibahas lebih lanjut oleh tim kecil yaitu DIM nomor 4. Sementara DIM Tetap (Kosong dan strip) langsung disetujui oleh rapat kerja berjumlah 229 DIM, DIM yang dimaksud adalah DIM nomor 1 sampai dengan 486.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengusulkan agar DIM Tetap nomor 113 A yaitu tambahan pada butir D, yakni untuk petugas karantina, tumbuhan dan satwa liar agar juga bisa dimasukkan.

## DPR RI Temukan Kecurangan Tabung Gas Elpiji 3Kg Di Jateng

Anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan BUMN menemukan kecurangan penjualan tabung gas elpiji bersubsidi 3Kg dengan cara menambahkan lempengan besi di tabung gas elpiji di salah satu pusat pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) PT. Sekawan Maju Mapan dan Perusahaan Pemeliharaan (Retest, Repair, Repaint) Tabung LPG 3Kg PT. Armashita Multiartha Niaga di Klaten, Jawa Tengah, Jum'at (24/6).

**A**wal muasalnya, politisi Partai Golkar asal Dapil Jateng V ini sedang menyelenggarakan "Pasar Murah" di Lapangan Sriwaru Mutihan, Sondakan, Laweyan, Solo-Jawa Tengah, dan mendapatkan informasi terkait dengan kecurangan tabung gas elpiji 3kg dari konstituennya yang belanja sembako di Pasar Murah.

Apa yang disampaikan oleh konstituennya, dengan sigap dan rasa marah, Endang (demikian panggilan akrabnya) langsung menghubungi aparat keamanan untuk mendampingi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pusat pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) PT. Sekawan Maju Mapan yang terletak di Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper, dan Perusahaan Pemeliharaan (Retest,



Anggota Komisi VI Endang Srikarti meninjau perusahaan gas elpiji di Klaten

*Repair, Repaint*) Tabung LPG 3Kg PT. Armashita Multiartha Niaga.

Sesampainya di lokasi (SPPBE) PT. Sekawan Maju Mapan, Endang dan aparat keamanan melihat langsung dalam angkutan truk maupun yang ada di luar truk ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh konstituennya itu bahwa terdapat plat (lempengan) besi 1-3 lempeng dipinggiran tabung gas elpiji 3kg. Endang marah besar sambil berkata "Ini curang, ini sangat merugikan konsumen. Koq bisa begitu ya ngakalannya. Isi tabung gas elpiji 3kg yang disubsidi untuk rakyat kecil justru saat kita timbang dan disaksikan oleh aparat keamanan, isinya tidak sesuai dengan takarannya," Katanya.

Gas Elpiji 3kg subsidi ini kan untuk rakyat kecil, ungkap Endang, kenapa harus dicurangi lagi dengan menambah berat tabung gas elpiji melon dan mengurangi isi gasnya. Tabung gas elpiji kosong itu ditimbang beratnya antara 5,3kg hingga 5,8kg, padahal standar berat tabung kosong hanya 5kg.

Ia meminta tabung gas elpiji 3kg yang siap kirim (dalam truk), yang akan dijual ke masyarakat, semua itu harus ditarik kembali, dan tidak boleh diedarkan sebelum diperbaiki.

"Temuan ini akan kita bawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja kita (PT. Pertamina), dan Dirut Pertamina harus dapat menjelaskan kepada Komisi VI DPR RI terkait masalah ini," pungkasnya. ■



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

"Selama ini petugas kami tidak pernah masuk ke d a l a m bandara dan hanya berada di luar, dan

*traffic* tumbuhan dan satwa liar luar biasa banyaknya, dan sudah menjadi perhatian. Demikian pula kasus-kasusnya, selama satu tahun kemarin, lebih dari 90 kasus yang ditangani. Namun upaya pencegahannya relatif berat karena petugas kita tidak boleh masuk. Saya berkali-kali berjuang ke Bea Cukai tetapi tidak pernah berhasil karena alasan Undang-undang," tandasnya.

Setelah mendengarkan masukan dan alasan yang diajukan oleh Menteri LHK itu, Komisi IV akhirnya menyetujui dan menyambut baik usulan tersebut. ■

(depmp), Foto: Naefurrijibr

(fot), Foto: Feam/hr

## Peredaran Vaksin Palsu Mengkhawatirkan

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkhawatirkan efek samping yang ditimbulkan bagi tubuh manusia terutama anak-anak akibat penyuntikkan vaksin palsu. Apalagi, peredarannya telah terjadi selama kurun waktu 13 tahun di tiga daerah, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Sebetulnya walau kandungannya hanya 0.0 sekian persen, menurut saya sudah mengkhawatirkan, karena itu langsung kontak ke tubuh. Tentu ada reaksi-reaksi tubuh atas zat yang disuntikkan ke dalam tubuh anak-anak. Kemarin IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) sudah menyatakan efek

sampingnya bisa diabaikan. Semoga saja zat-zat yang disuntikkan dari vaksin palsu itu memang tidak menyebabkan sesuatu bagi anak-anak,” ujar Ichi, sapaan akrab Andi Fauziah usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (28/6).

Terkait isi kandungan vaksin yang belum jelas, ungkap Ichi, Komisi IX merasa kecewa dengan jawaban Menkes saat rapat. Begitu pula BPOM belum tahu kandungan vaksin tersebut.

Padahal, Komisi IX sudah seminggu lalu bertanya dan belum ada jawaban. “Kami kemarin agak kesal, karena kasus ini sudah seminggu

ditanyakan ke BPOM. Mereka beralasan bahwa baru akan mengambil sample dari pihak Kepolisian. Tetapi, karena tidak diperkenankan oleh polisi, mereka coba kumpulkan dari tempat-tempat lain.”

Saat ini, sambung politisi Partai Golkar itu, vaksin palsu masih dalam proses uji laboratorium. Informasi yang menyebutkan bahwa vaksin itu mengandung cairan infus dan antibiotik juga tidak selamanya benar. Kemenkes belum memberi keterangan yang pasti. Kemenkes hanya memastikan bahwa dari jalur resmi tidak ada vaksin palsu. “Saya curiga ada oknum yang bermain, sebab sudah 13 tahun kejadian ini berlangsung dan berulang,” kata Ichi.

“Kami minta diaudit secara tuntas. Meskipun IDAI mengatakan efeknya dapat diabaikan, tapi sudah menimbulkan riuh di masyarakat,” ucap politisi dari dapil Sulsel III. Dan Kemenkes maupun BPOM dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini, sebab mereka adalah *leading sector* dalam masalah tersebut. Komisi IX telah meminta kepada BPOM agar meningkatkan kewaspadaannya, karena hal ini merupakan kejadian yang sudah berulang,” tandas Ichi lagi. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta

## RUU Sisbuk Rampung Tahun Ini

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk) diupayakan rampung pada akhir tahun ini. RUU inisiatif DPR RI ini melindungi semua pihak, baik penerbit, percetakan, penulis, hingga konsumen. Dengan regulasi yang mengatur sistem perbukuan, kelak distribusi, konten, dan harga buku terjamin.

“Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU Sisbuk, Selasa (28/6). Hadir sebagai pembicara Ceu Popong Anggota Komisi X DPR RI, Dewan Pertimbangan Pusat IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Setya Dharma Madjid, dan dosen Politeknik Negeri Jakarta Noor Riyadi. Menurut Ceu Popong, sempat ada sedikit perdebatan

dengan pemerintah soal judul RUU ini. Pemerintah mengusulkan judulnya Sistem Perbukuan Nasional, karena berlaku hanya di dalam negeri.

Usulan itu tidak disetujui Komisi X. Nama UU Sisbuk tanpa kata nasional



Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjungan dalam forum legislasi DPR RI

sudah cukup diketahui bahwa UU itu pasti berlaku secara nasional, tidak berlaku di luar negeri. "Kalau sudah namanya UU, ya berarti hanya berlaku di Indonesia, walau tidak ada nama nasionalnya, ungkap Ceu Popong.

Selama ini, kontrol terhadap buku-buku teks belum ada. Kelak, bila RUU ini sudah diundangkan, kontrol terhadap peredaran buku-buku teks lebih mudah. "Peredaran buku teks, kan, terbatas. Apalagi penulisnya juga tidak sembarang. Berbeda dengan buku umum yang lebih sulit dikontrol, karena sangat

luas peredarannya. Penulisnya pun berasal dari beragam latar belakang," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Ceu Popong juga menegaskan, buku bisa menjadi salah satu bagian dari masa depan anak-anak didik. Untuk itu, semua bergantung pada pembahasan RUU Sisbuk. Secara prinsip, tak ada lagi perbedaan yang mencolok antara DPR RI dan pemerintah dalam merumuskan RUU ini. Sementara itu, Setya Dharma menuturkan, saat ini para penulis terkenal Indonesia malah terkenal di luar negeri. Para penerbit dan kampus-

kampuslah yang mempopulerkan nama mereka.

Ironisnya, di Indonesia tak ada gerakan yang masif mempopulerkan para penulisnya. Dari bukulah kearifan lokal bisa terkuak dan terpelihara. Dan IKAPI sendiri sudah menyerahkan pula draf RUU Sisbuk ini ke Komisi X sebagai bahan pembandingan. "Selama ini belum terbangun literasi nasional, karena belum ada sistem. Harga buku yang dirasa mahal juga bisa dikontrol bila sudah ada sistem yang terbangun lewat UU. ■

(mb), Foto: andri/hr

## Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Jembatan Holtekamp

Usai melakukan peresmian 100 unit rumah khusus bagi Pokja Keagamaan, rombongan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Michael Wattimena meninjau pembangunan pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, Sabtu (25/6)

Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Tim Kunjungan Komisi V DPR RI melihat secara langsung perkembangan pembangunan fisik Jembatan Holtekamp yang mulai dibangun pada tahun 2015.

"Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2015, dan diharapkan pada tahun 2018 selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat Papua khususnya," kata Michael Wattimena.

Menurut Michael, Jembatan Holtekamp menjadi salah satu objek kunjungan Komisi V DPR RI ke Papua, pasalnya pembiayaan pembangunannya meliputi tiga aspek, yakni pertama pembiayaan yang bersumber dari Kota Jayapura, kedua dari Provinsi Papua dan ketiga dari APBN.

"Dan jumlah signifikansi yang dikontribusikan dari APBN, sehingga kami perlu melakukan pengawasan, karena hampir mendekati 1 triliun untuk pembiayaan pembangunan jembatan ini,"



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan jembatan Holtekamp di Jayapura

jelas Michael yang juga politisi dari dapil Papua Barat ini.

Selain itu, tambah Michael, selain dimanfaatkan khususnya untuk mobilisasi masyarakat Papua, rencananya jembatan ini juga akan menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di tahun 2020 mendatang.

Pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua terus dikebut. Jembatan sepanjang 733 meter ini menunjukkan perkembangan

pembangunan fisik yang positif.

Jembatan ini berdiri di atas laut di teluk Youtef, menghubungkan daerah Hamadi di Distrik Jayapura Selatan yang berada di sisi barat jembatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.

Jembatan ini juga punya peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di kawasan yang terhubung yakni daerah Hamadi di Distrik

Jayapura Selatan yang berada di sisi barat jembatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.

Kunjungan Komisi V Kali ini, diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia (F-PKS), Saiful Rasyid (F-Gerindra), Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Mahfudz Abdurahman (F-PPKS), Ahmad H.M Ali (F-Nasdem), Musa Zainuddin (F-PKB). ■

(mb), Foto: Nita/hr

## Kemendagri Diminta Tinjau Ulang Pembatalan Perda Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan meninjau ulang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan. Ia menilai, hal ini tidak sesuai dengan semangat pemerintahan untuk memajukan pendidikan.

Sebagaimana diketahui, diantara 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Kemendagri, ternyata 72 di antaranya mengatur terkait pendidikan. Padahal sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Perda yang dibatalkan hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak.

Beberapa di antaranya yakni, Perda Nomor 14 Tahun 2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.

Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

"Kalau kita ingin konsentrasi memajukan pendidikan dan menjamin selamat tidaknya generasi mendatang, pembatalan Perda yang mengayomi dan memberikan aturan tentang fungsi pendidikan di suatu daerah, perlu dievaluasi. Saya kira ini kontraproduktif dengan rencana besar dari Pemerintah," tegas Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut politisi F-PKS itu, Kemendagri harus merujuk pada Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Selain, itu juga perlu dilihat UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sebaiknya disinkronkan, atau kembali ke UU ini. Saya kira supaya tidak menimbulkan banyak hal dan konflik kepentingan sektoral, sebab perda dibentuk untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan di daerah

masing-masing. Apalagi yang bersifat sektoral, pendidikan misalnya," imbuh Fikri.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menyarankan kepada Kemendagri untuk kembali ke peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kemudian ia meminta Kemendagri lebih memperhatikan semua sektor.

"Kemendagri kan tidak hanya mengatur masalah pemerintahan saja, tetapi juga ada sektor lain, seperti pendidikan. Kalau sektor pendidikan, kesehatan yang membangun ekonomi, sebagai standar untuk pembangunan indeks manusia, ini tidak terjaga, dapat berbahaya," tegas Fikri.

Fikri mengakui daerah bisa



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun ia merasa hal ini bisa diselesaikan oleh Kemendagri. ■

(sf), foto: Azka/br

## Badan Keahlian DPR RI Terima DPRD Pamekasan

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura di Gedung Kesenjangan DPR RI, Selasa (28/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Pamekasan, Madura.

Dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pamekasan (Baperda) Andi Suparto meminta masukan seputar program pembentukan perda di luar program legislasi daerah (prolegda). Ia juga mempertanyakan

terkait peran Baperda dalam proses pembahasan perda usulan eksekutif.

Menurut Andi, Baperda sebagai institusi pembentukan peraturan daerah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap Raperda yang diusulkan oleh eksekutif, sedangkan

## Setjen DPR RI Gelar PPM Probity Audit

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas Auditor di lingkungan Inspektorat Utama, Setjen DPR RI menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri yang mengangkat tema tentang Probity Audit. Pada kesempatan itu yang bertindak sebagai narasumber adalah Auditor Muda Enden Adipati Koma, dan dihadiri oleh para auditor Setjen .

“ Salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang atau jasa berlangsung (real time) yang disebut probity audit. Probity diartikan sebagai 'good process' yaitu proses pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku," papar Enden Adipati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).

Ia juga menjelaskan probity audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

"Hal yang mendasari diterbitkannya pedoman probity audit yaitu untuk



Suasana Pelatihan Mandiri yang mengangkat tema tentang Probity Audit

mendorong peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang atau jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor atau hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

"Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ," pungkas Enden. ■



Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk didampingi Ketua Baperda DPRD Pamekasan Andi Suparto

eksekutif seringkali mengajukan Raperda di luar program legislasi daerah.

"Eksekutif seringkali memberikan masukan di luar Prolegda, sementara BP2D atau Baperda tidak diberikan ruang

daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Namun, BP2D memiliki peran untuk melakukan kajian urgensi terhadap raperda yang diusulkan di luar prolegda.

untuk mengkaji raperda eksekutif. Padahal BP2D merupakan dapur perda di kabupaten," ungkap Andi.

Menanggapi hal tersebut, Johnson mengatakan, Badan Pembentuk Peraturan Daerah memang tidak mempunyai kewenangan untuk mengkaji materi rancangan peraturan

Sedangkan Alat Kelengkapan Dewan, baik Komisi maupun Pansus berhak untuk melakukan kajian materi terhadap rancangan perda yang diusulkan oleh eksekutif.

"Sebetulnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan peraturan daerah sudah diakui dalam UU Nomor 12 Tahun 2009, disana sudah ada tata caranya bagaimana menyusun dan menetapkan program legislasi daerah. Nah, kalau ada raperda diluar program legislasi daerah, pada saat itulah peran BP2D diperlukan, yakni menentukan kajian-kajian urgensi dari pengajuan raperda itu," jelasnya. ■

# Budayawan Sumbar Beri Masukan RUU Kebudayaan

Beberapa Budayawan Sumatera Barat (Sumbar) yang hadir dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih dengan Gubernur Sumbar Iwan Prayitno memberikan masukan dan penilaiannya terkait RUU tentang Kebudayaan yang sedang dibahas Komisi X DPR RI.

**B**udayawan dan Sastrawan Darman Moenir menilai kebudayaan tidak bisa diatur dalam sebuah peraturan atau undang-undang, sebab kebudayaan bersifat abstrak. Pengelolaan kebudayaan pun juga tidak perlu diatur sebab hanya akan menunjukkan sifat totaliter sebuah negara. Namun demikian, pemerintah dapat menata, melindungi maupun melestarikan, misalnya produk-produk dari kebudayaan. "Menurut saya yang lebih pas

namanya adalah RUU tentang Produk Kebudayaan," katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Jumat (17/06)

Darman menambahkan, RUU Kebudayaan yang dibahas sejak 2008 dan belum selesai hingga sekarang menunjukkan bahwa eksistensi daerah dan budaya lokal sulit atau tidak bisa diatur dalam sebuah peraturan. Eksistensi baju daerah, ikat kepala daerah, jilbab dll akan hidup dengan etika dan estetikanya sendiri jika "dibiarkan" sesuai dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Sementara, Hendra Matius dari Universitas Andalas menyatakan bahwa kehadiran RUU Kebudayaan justru dikhawatirkan tidak memenuhi kebutuhan terhadap esensi kebudayaan. RUU kebudayaan dikhawatirkan justru akan mereduksi peran kebudayaan. Yang diperlukan adalah UU yang lebih spesifik mengatur tentang misalnya film (sepaimana telah diatur dalam UU Perfilman), situs budaya (sepaimana telah diatur dalam UU Cagar Budaya), atau peraturan lain yang dibutuhkan dan lebih bersifat kongkret dan teknis, misalnya UU tentang pakaian adat, tentang masyarakat adat, tentang kuliner daerah dan lain-lain.

Ia juga mempertanyakan, apakah RUU Kebudayaan yang diharapkan menjadi



Suasana pertemuan Tim Kunker Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dengan Pemkot Sumbar

"induk" dari UU yang lebih bersifat teknis (seperti UU Perfilman atau UU Cagar Budaya) akan bersifat sub ordinatif atau komplementer. Hal ini terkait dengan langkah "penyederhanaan" dan bukan "pereduksian" terhadap kebudayaan yang telah berkembang di masyarakat.

Sedangkan Kepala Taman Budaya Sumbar Muasri dan beberapa budayawan Sumbar yang lainnya, menganggap tidak diperlukan atau dibentuk Dewan Budaya Nasional karena tugas dan wewenang

dan Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata.

Selanjutnya, Fery Yudi dari Taman Budaya Sumbar menilai istilah "industri budaya" dianggap tidak relevan terhadap budaya masyarakat yang diharapkan berkembang secara alami tanpa harus dijadikan komoditi industri yang bermotif material dan finansial. Budaya tidak sama dengan pariwisata yang memang bermotif keuntungan materi atau finansial. ■

## E-Katalog Cegah Peredaran Vaksin Palsu

Anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang mengatakan peredaran vaksin palsu tak akan terjadi jika selama ini pendistribusian obat menggunakan sistem e-Katalog yang melalui seleksi.

“Harusnya tidak terjadi peredaran vaksin palsu jika penyebaran obat melalui e-Katalog, karena seluruh obat itu terseleksi, dilakukan e-katalog ini kan untuk menghindari orang yang bisa berbuat curang, tidak selektif, lalai atau yang lainnya, tetapi masih terjadi hal ini berarti kan sistem ini sesungguhnya hanya tertulis saja tidak menyeleksi dengan baik,” katanya sebelum

Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

Ia membenarkan bila ini memang penipuan tetapi sistem e-Katalog yang dibuat Kemenkes harusnya bisa menyeleksi obat yang akan didistribusikan tapi ternyata sistem e-Katalog ini tidak bisa membendung penipuan yang terjadi.

"Kemenkes bisa menjadi kecewaan

# Heri Gunawan: Akan Terjadi *Shortfall* Rp 300 Triliun

Pendapatan negara dalam APBN 2016 yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dari pajak, diperkirakan akan terjadi *shortfall* atau kekurangan pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun. Nilai yang sangat fantastis ini akan mengakibatkan defisit APBN 2016 bisa mencapai Rp 480 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memaparkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Senin (27/6). Pandangan ini sekaligus juga merupakan pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam menyikapi RUU Pengampunan Pajak. Defisit itu mencapai 3,7 persen dari PDB. "Di tengah kondisi objektif yang sangat memprihatinkan tersebut, kita diberikan RUU Tax Amnesty dan naskah akademik oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perkiraan *shortfall* pendapatan negara tahun 2016 yang kami perkirakan sebesar Rp 300 triliun."

Diungkapkan Heri, realisasi penerimaan negara dalam lima bulan pertama 2016 ternyata lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu, baik PNBP maupun penerimaan perpajakan. Ini tak mampu diatasi dengan pengampunan pajak. Bila jadi disahkan, berarti program

pengampunan pajak ini yang ketiga kali diterapkan di Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan program yang sama untuk menutupi kekurangan penerimaan.

"Secara empiris, umumnya tingkat keberhasilan pelaksanaan program *tax amnesty* sangat minim.

Semua negara yang menjalankan program *tax amnesty* dapat dikatakan mempunyai alasan yang sama, yaitu pertama,



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

bagi masyarakat jika seperti ini, sebagai anggota komisi IX dalam waktu dekat akan menyempurnakan hal itu, kita akan kejar dalam waktu dekat membuat Panja atau apa lah nanti. Kita belum tahu dengan kasus ini apa yang harus dilakukan terhadap Kemenkes, kita lihat derajat kesalahannya seperti apa," imbuh legislator F-PKB itu.

Maka dari itu masalah pemotongan anggaran, Komisi IX mendesak pemerintah pengurangan di Badan POM tidak dilakukan karena BPOM ini menyangkut hajat hidup banyak orang apakah obat, makanan, kosmetik dan lain-lain. Dan kalau dilihat laboratorium BPOM sendiri tidak memadai kalau untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang

membutuhkan dana untuk menutupi *shortfall* atau kekurangan pendapatan. Kedua, membutuhkan repatriasi modal untuk memperkuat cadangan devisa. Dan ketiga, membutuhkan modal untuk menambah tabungan nasional," ungkap Heri.

Dijelaskan Heri, sikap masyarakat dan para akademisi terhadap program pengampunan pajak terbagi dua kelompok. Kelompok pertama, berpendapat jika pengampunan pajak diundangkan, maka terjadi ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Kelompok kedua, setuju pengampunan pajak diundangkan dengan alasan negara sedang butuh dana untuk pembangunan nasional. "Jika kedua pendapat tersebut merupakan tesa dan antitesa, maka Fraksi Gerindra merasa perlu untuk mengajukan sintesa."

Saat ini, sambung Heri lagi, negara sedang menghadapi krisis pendapatan negara. Bila tak ada krisis, dapat dipastikan Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pengampunan Pajak menjadi UU. Karena dalam keadaan krisis pendapatan, maka fraksinya, kata Heri, menyatakan setuju dengan berbagai catatan kritis. Pertama, pemerintah harus membuktikan dengan kerja keras mengejar tambahan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun. Fraksi Gerindra memprediksi keberhasilannya hanya Rp 30 triliun saja.

Kedua, setelah RUU Pengampunan Pajak diundangkan, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah mengadakan reformasi pajak, sehingga dalam 3 tahun mendatang (2019) *tax ratio* Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB. Ketiga, bila RUU Pengampunan Pajak disahkan, diharapkan ini kebijakan yang terakhir kali bagi bangsa kita dan kelak tak ada lagi program pengampunan pajak.

Catatan kritis keempat, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk melakukan repatriasi modal yang diperkirakan berjumlah Rp 11.000 triliun berada di luar negeri. Dan terakhir, mendesak pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dalam menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT bulanan atau setiap tahun. ■

## BURT DPR RI Tegur Jasindo Kaltara

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso memberikan teguran kepada PT Jasindo karena belum memberikan sosialisasi SOP (*Standard Operational Procedure*) kepada RSU Tarakan, Kalimantan Utara, terkait penanganan dan pelayanan program Jamkestama (jaminan kesehatan utama) bagi anggota DPR RI.

RSU Tarakan Kalimantan utara ini merupakan salah satu rumah sakit yang bekerjasama dengan PT Jasindo, *provider* yang menangani program Jamkestama bagi anggota DPR RI. Nah, tadi kami sempat mendapat penjelasan dari Wakil direktur (Wadir) rumah sakit ini, pak Riduan bahwa pihaknya belum mengetahui prosedur yang harus dilakukan jika ada anggota DPR RI atau peserta Jamkestama lainnya sakit di rumah sakit ini," ungkap Agung saat mengunjungi RSU Tarakan, Kaltara, Kamis (23/6).

Hal itu menyusul pertanyaan yang diajukan oleh anggota BURT lainnya, Anton Sukartono kepada Wadir rumah sakit ini terkait penanganan pihak rumah



Wakil Ketua dan anggota BURT DPR RI Agung Budi Santoso dan Anton Sukartono

sakit jika ada peserta Jamkestama sakit dan datang ke rumah sakit tersebut.

Padahal sejatinya sejak PT Jasindo bekerjasama dengan rumah sakit tersebut untuk program Jamkestama, perusahaan asuransi ini harus menjelaskan SOP nya.

Mulai dari tindakan yang harus dilakukan *front office*, dokter, hingga bagian administrasi di rumah sakit tersebut. Termasuk jika peserta Jamkestama itu lupa membawa kartunya. Hal itu menurut Agung semata untuk memberikan pelayanan yang prima bagi peserta Jamkestama.

"Seharusnya saat bekerjasama dengan rumah sakit tersebut sudah dijelaskan SOP dan data peserta Jamkestama beserta keluarganya. Jadi jika ada peserta Jamkestama sakit, mulai dari *front office*, dokter hingga bagian administrasi sudah tau apa yang harus dilakukan," jelas politisi dari fraksi partai Demokrat ini.

Hal senada juga disampaikan anggota BURT lainnya seperti Anton Sukartono, Refrizal, Elva Hartati, dan Sri Melliyan yang berharap agar SOP tersebut segera disosialisasikan kepada seluruh rumah sakit yang menjadi mitra Jasindo. Bahkan lebih jauh mereka berharap agar Jasindo mendirikan kantor cabang di setiap wilayah yang notabene terdapat rumah sakit yang menjadi *provider* Jamkestama. ■

(Ayu), Foto: Ayoafor

## Legislator Sesalkan Pembatalan Perda Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menyayangkan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dadang, Perda berkaitan pendidikan gratis tak seharusnya dibatalkan.

Sebagaimana diketahui, diantara 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Kemendagri, ternyata 72 di antaranya mengatur terkait pendidikan. Padahal sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaskan bahwa Perda yang dibatalkan hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak.

Beberapa di antaranya yakni, Perda Nomor 14 Tahun 2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.

Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

"Perda soal pendidikan gratis itu tidak bisa dibatalkan

selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu," tegas Dadang di Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi F-Hanura itu mengakui, pendidikan gratis yang boleh dilakukan Pemda dibatasi di tingkat menengah saja, yakni SMA/SMK. Untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi (PT) itu bukan lagi kewenangan Pemda. "Kalau PT yang digratiskan, itu sudah melampaui

batas," imbuhnya.

Dadang menyarankan Mendagri perlu menjelaskan terkait Perda Pendidikan yang dihapus. "Apakah melampaui kewenangan atau diskriminatif. Itu perlu dijelaskan, karena abu-abu sekali," pintanya.

Pemda yang berkeberatan dengan pencabutan Perda itu, menurut Dadang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Keputusan pejabat publik bisa di PTUN-kan. Selama alasannya jelas, kenapa tidak," saran politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Ia juga menyarankan Komisi X DPR RI memanggil kepala daerah yang Perda Pendidikannya dibatalkan. "Kami coba klarifikasi di Komisi X. Kita juga minta pemerintah tidak tergesa-gesa. Karena ini kan hanya diberi waktu 14 hari," tutup Dadang. ■

(Gf), Foto: Ayoafor



Setjen DPR RI, Irtama dan Karo Perencanaan dan Keuangan DPR RI

## Setjen DPR RI Kembali Raih WTP, Irtama Tingkatkan Kualitas Pengawasan

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut. Menanggapi hal tersebut, Inspektur Utama Setyanta Nugraha menegaskan akan terus mempertahankan predikat WTP dan meningkatkan kualitas pelaporan pada tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di Auditorium BPK RI, Jakarta pada Rabu, (28/06).

"Tentu WTP tak sekedar harus dipertahankan tapi bagaimana meningkatkan kualitas. Karena WTP ini opini tertinggi yang melihat kesesuaian antara pelaporan dan kaidah akuntansi," ujar Setyanta.

Ia pun menjelaskan bahwa tugas Irtama adalah mendorong kelembagaan untuk tertib administrasi dan keuangan, sehingga berperan dalam mengubah paradigma menjadi *quality insurance* dan konsultasi. "Irtama hadir dalam rangka mendorong entitas untuk tertib administrasi dan tertib keuangan serta disiplin anggaran. Sehingga perannya adalah mengubah paradigma menjadi *quality insurance* dan konsultasi. Sehingga lebih pada fungsi pencegahan *early warning system*," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Setya, dalam pemeriksaan BPK, Irtama pun ikut mendampingi auditor. "Kalau dulu ketika masih pengawasan internal itu mendampingi BPK, kalau sekarang mendampingi auditor. Jadi membantu auditor bagaimana menjawab pertanyaan dari BPK. Kemudian mengkoordinasikan seluruh unit kerja ini. Ketika ada tim pengawas BPK masuk, kita yang mengkoordinasikan," terang Setyanta.

Setyanta pun menjelaskan bahwa saat ini, sistem pengelolaan pengawasan sudah lebih modern dengan menggunakan teknologi informasi berbasis data. "Sekarang sudah mengembangkan aplikasi, misalnya dalam perencanaan sudah mengembangkan sistem perencanaan (sincan), jadi bagaimana ketika unit kerja merencanakan anggaran sudah dilengkapi dengan data dukung, misalnya TOR. Dari situ kita melihat TOR ketika diusulkan apakah anggarannya betul-betul *urgent* dan mendesak serta bisa dipertanggungjawabkan. Selain TOR, juga RAB yakni rincian biaya," paparnya.

Rincian biaya dini, lanjut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran itu sudah sesuai dengan bagan akun standar. "Nah ini yang seringkali meleset. Misalkan belanja barang kemudian dalam pelaksanaannya menjadi belanja modal. Dengan proses awal ini sudah ada RAB sehingga bisa lebih tertata. Sehingga *endingnya* perencanaan anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ini dari sisi perencanaan," tutur Setyanta.

Kemudian dari sisi pelaksanaan, Setjen DPR RI menggunakan sistem semar. Yakni bagaimana unit kerja bisa dikoordinasikan melalui sistem. "Jadi berapa unit kerja menggunakan anggaran, kemudian anggarannya untuk apa saja sudah tersistem. Karena kita juga diwajibkan untuk menyampaikan realisasi anggaran tiap bulan melalui Teptra. Itu yang dikelola oleh Wapres," paparnya dengan menambahkan, tiap bulan, lembaganya harus menyetorkan laporan apa saja yang sudah digunakan anggarannya. "Itu melalui Teptra, dikoordinasikan melalui sistem yang sudah diberlakukan," terangnya. ■

(b.s.m.p./jrc./Jakarta)

# JENDELA PARLEMEN



Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan tiga Kementerian (mitra kerja Komisi V), dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemy Francis terkait perencanaan anggaran APBNP 2016, Selasa (28/6). Foto: Naefuroji/hr

Raker Komisi IX DPR RI dengan Menkes dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf perihal peredaran vaksin palsu, Selasa (27/6)  
Foto : Jayadi/hr



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi sejumlah Anggota DPR RI meninjau Bandara Soekarno - Hatta jelang lebaran, Rabu (29/6)  
Foto : Kresno, Runi/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

